

2025 RENJA

RENCANA KERJA



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS SOSIAL

Jl. Usman Ambon No. 25 Kota Pangkalpinang || Telp. [0717] 421896 / 421897
www.sosialpangkalpinang.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Renja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan mengacu pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan.

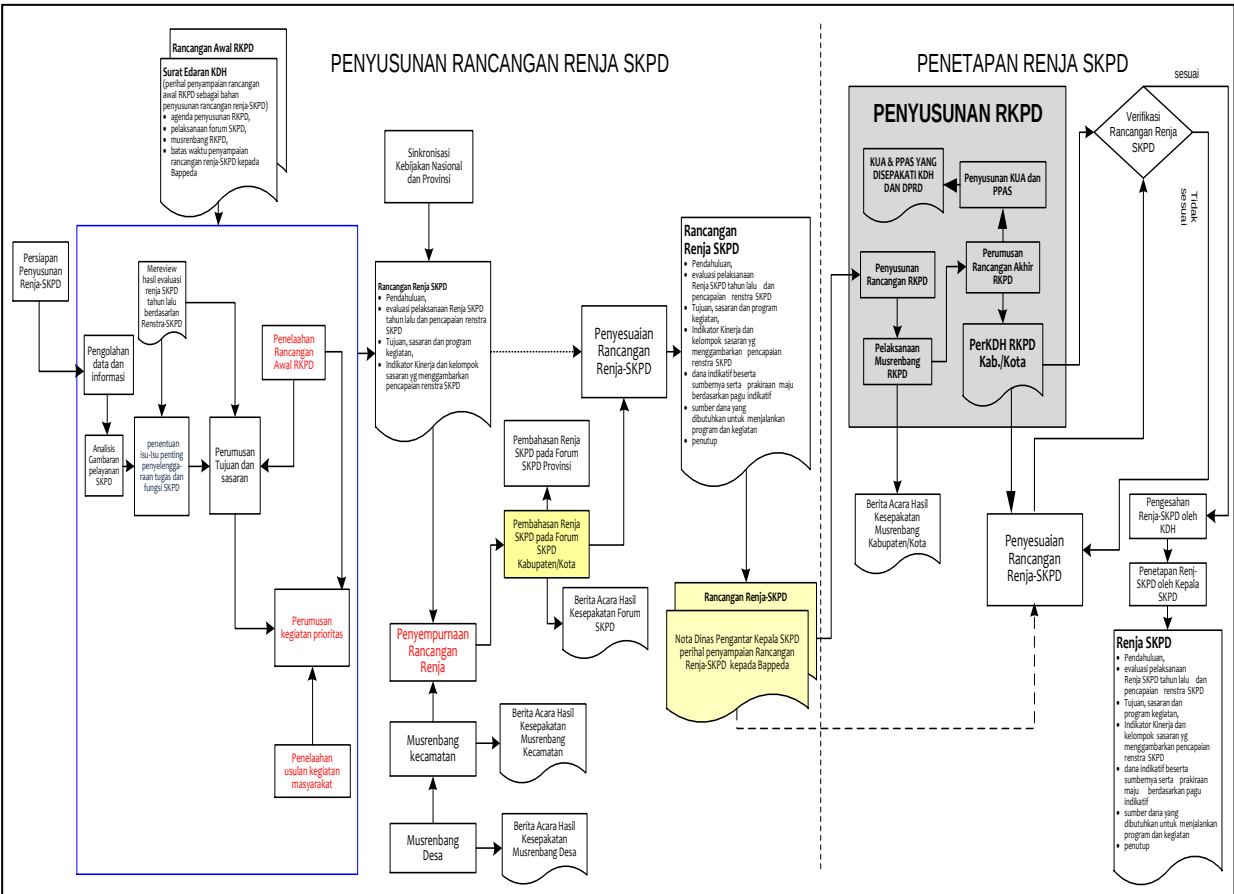
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020, antara lain :

- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2018-2023.
- Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota 2017 Nomor 10).
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50).
27. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpiannng Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Noor 144);
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam penyusunan RKA Tahun 2025 serta panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan

program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 sebagai :

1. Perumusan program-program prioritas.
2. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh OPD.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengukuran keberhasilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja OPD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja OPD.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu OPD Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.2.9
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 (Triwulan II)
Kota Pangkalpinang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2024			
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi Anggaran (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	26.606.000	9.274.256	100 %	34,86%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.062.825	2 Dokumen	53,14%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	718.836	2 Dokumen	35,94%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	-	2 Dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.000.000	717.171	2 Dokumen	35,86%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	-	2Dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.836.000	3.323.580	4 Laporan	56,95%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.270.000	3.451.844	4 Laporan	30,63%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	4.458.728.012	2.136.711.272	100%	47,92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.452.728.012	2.136.711.272	36 Orang/bulan	47,92%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	-	8 Laporan	0
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4.000.000	-	9 Laporan	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	8.044.400	-	100%	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.059.200	-	1 Dokumen	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.985.200	-	4 Laporan	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	30.635.000	-	100%	0

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.635.000	-	108 Dokumen	0
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000	-	5 Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	188.719.401	66.020.793	100%	34,98%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.000.000	-	2 Paket	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.000.000	-	2 paket	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.268.500	200.000	3 Paket	1,31%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28.552.500	1.000.000	2 Paket	3,50%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.094.200	1.700.000	2 Paket	14,06%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11.500.000	-	4 Dokumen	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.070.000	-	12 laporan	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.434.201	63.120.793	4 laporan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.800.000	-	1 Dokumen	96,35%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.101.336	183.491.953	100%	31,96%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	160.000.000	22.240.393	4 Laporan	13,90%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.575.000	-	4 Laporan	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	393.526.336	161.251.560	4 Laporan	40,98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	395.222.484	111.989.860	100%	28,34%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48.231.696	21.133.620	1 Unit	43,82%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	196.990.788	90.856.240	7 Unit	46,12%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.000.000	-	1 Unit	0
	Program Pemberdayaan Sosial					
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.434.700	4.030.000	80%	27,92%
	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	14.434.700	4.030.700	50 Dokumen	27,92%

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	1.069.067.340	485.725.499	65,12%	45,43%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	950,434,568	421.946.719	60 Orang	112 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	99,872,072	46.338.780	7 Orang	150 %
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	18,760,700	17.440.000	7 Sertifikat	92,96%
	Program Rehabilitasi Sosial					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar; Anak Terlantar; Lanjut Usia Terlantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	253,200,000	130,260,977	100%	51,45%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	49,600,000	100 Orang	99,20%
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	18,737,140	50 Orang	93,69%
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	1,358,800	50 Orang	2,72%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	2,806,600	10 Orang	18,71%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	13.200.000	2,250,000	15 Orang	17,05%
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga yang mendapatkan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	15.000.000	6,150,000	15 Orang	41%
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500.000	-	50 Orang	0
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500.000	-	60 Orang	0
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	7,300,000	50 Orang	73%

	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	6,000,000	10 Orang	24%
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	2,050,000	20 Orang	51,25%
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.000.000	34,008,437	50 Orang	73,93%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	211,500,384	90,249,706	100%	42,67%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60,510,000	48,992,000	1.250 Orang	98,39 %
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	53,400,000	33,047,273	10 Orang	5,41 %
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	92,590,384	90,823,600	30 Orang	94,65 %
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5,000,000	-	10 Dokumen	0
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	257,076,000	40,095,609	40,095,609	15,60%
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	61,164,000	9,526,047	3.000 Orang	15,57%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	51,770,000	19,879,437	8,656 Keluarga	38,40%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	69,500,000	10,690,125	30 Keluarga	15,38 %
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74,642,000	-	35 Orang	-
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	127,550,000	20,550,571	100%	16,11%
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	56,100,000	11,964,946	50 Orang	21,33 %
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	39,200,000	3,811,505	50 Orang	9,72 %

	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	-	25 Unit	0
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	17,250,000	4,500,000	135 Orang	26,09%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	274,120	135 Orang	5,48%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	683,414,096	301,818,469	100%	44,16%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6,000,000	4,100,000	2 Kampung	68,33%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	677,414,096	297,718,469	50 Orang	43,95%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Restra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar bagi PPKS dan penanganan bencana;
2. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar;
3. Keterbatasan infrastruktur sosial yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PPKS;
5. Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai penunjang SDM bidang sosial yang menangani langsung permasalahan sosial di masyarakat;
6. Sinkronisasi dan pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Basis Data Terpadu/BDT) dengan data sektoral penerima bantuan dan data PPKS belum maksimal dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* dan *exclusion error* ;
7. Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan;
8. Dukungan kebijakan alokasi anggaran dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum memadai;

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh

Dinas Sosial untuk tahun 2025 secara umum berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, di antaranya sebagai berikut :

1. Masih berfluktuasinya tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang dengan rentang indikator Persentase Penduduk Miskin di tahun 2020 sebesar 4,36 %, Tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 4,76 % dan sedikit menurun Tahun 2022 sebesar 4,55 % dari populasi jumlah penduduk yang terus meningkat;
2. Ketersediaan database PPKS yang belum memadai;
3. Masih maraknya gelandangan dan pengemis yang memenuhi jalanan kota;
4. Belum memadainya sarana/prasarana rumah singgah/ penampungan sementara yang representatif;
5. Kerjasama, koordinasi dan sinergisitas antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, lintas sektoral untuk penanganan gelandangan dan pengemis belum efektif dan terintegrasi dengan baik.
6. Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel) yang memperoleh pelayanan dasar dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK;
7. Aksesibilitas bagi ODK/Penyandang Disabilitas di luar panti;
8. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pemberdayaan orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel).
9. Masih merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial masyarakat di wilayah perkotaan;
10. Sarana dan prasarana pelayanan sosial yang belum memadai.
11. Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam, kondisi geografis perkotaan, faktor ketidaksengajaan/ kecelakaan seperti banjir, puting beliung, gelombang pasang, kebakaran dan lain sebagainya;
12. Potensi konflik sosial/keresahan sosial akibat pergesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, sosial dan politik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD 2024 dengan hasil analisa kebutuhan pada Renja 2024, adapun review terhadap Rancangan akhir RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kota pangkalpinang

Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	16,336,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	16,336,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	900,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	900,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	420,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	420,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	210,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	210,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,270,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,270,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,360,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,360,000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org/Bln	4,454,638,993	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org/Bln	4,454,638,993
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	10,060,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	10,060,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	5,080,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	5,080,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100 %	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,800,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,800,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Laporan	2,160,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Laporan	2,160,000

			Barang Milik Daerah pada SKPD			SKPD		Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta sribut kelengkapan	2 Paket	42,009,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta sribut kelengkapan	2 Paket	42,009,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108 Dokumen	2,430,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108 Dokumen	2,430,000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pk. Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pk. Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,682,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,682,500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15,268,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15,268,500
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	72,459,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	72,459,900

			Disediakan					Disediakan		
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26,686,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26,686,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,000,000
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,540,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,540,000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	132,021,523	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	132,021,523
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,600,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Unit	97,159,000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Unit	97,159,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	61,599,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	61,599,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	96,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	96,000,000
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22,550,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22,550,000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,750,000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215,000,000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,549,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,549,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pk. Pinang				Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Pk. Pinang		Supaya	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase terlaksananya	90%		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase terlaksananya	90 %	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	32,719,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	32,719,000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	80,07 %		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	80,07 %	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	543,662,432	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	543,662,432
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	87,413,072	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	87,413,072

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pk. Pinang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	59,174,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pk. Pinang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	59,174,000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pk. Pinang				Program Rehabilitasi Sosial	Pk. Pinang			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar; Anak Terlantar; Lanjut Usia Terlantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar; Anak Terlantar; Lanjut Usia Terlantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	
	Penyediaan Permakanan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157,350,000	Penyediaan Permakanan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157,350,000
	Penyediaan Sandang	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25,500,000	Penyediaan Sandang	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25,500,000

	Penyediaan Alat Bantu	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13,200,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	10,750,000
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	12,500,000

	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2,500,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	2,500,000
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	2,500,000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2,500,000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4,000,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4,000,000
	Pemberian Layanan Rujukan	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	46,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	46,000,000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	100 %		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	100%	

			sosial					sosial		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,513,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,513,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7,500,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7,500,000
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	15,000,000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	15,000,000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pk. Pinang				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pk. Pinang			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah	100 %		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah	100 %	

			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000 Orang	39,880,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000 Orang	39,880,000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	260 Keluarga	376,600,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	260 Keluarga	376,600,000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pk Pinang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	65,180,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pk Pinang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	65,180,000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pk Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	80.380,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pk Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	80.380,000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	
	Penyediaan Makanan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	537 Orang	100,000,000	Penyediaan Makanan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	537 Orang	100,000,000

			Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Sandang	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	62,310,000	Penyediaan Sandang	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	62,310,000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pk Pinang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Unit	51,550,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pk Pinang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Unit	51,550,000
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	22,825,000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	22,825,000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pk Pinang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	15,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pk Pinang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	15,000,000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	100 %		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	100 %	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	4 Kampung	12,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	4 Kampung	12,000,000

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	140,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	140,000,000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD Perubahan mengacu pada RPJMD dan RPJMN. Dalam RPJMN 2015 - 2019, telah menetapkan Visi Presiden terpilih yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-Royong. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepentingan dalam kebudayaan.

Dalam mencapai visi dan misi RPJMD-Nasional Tahun 2014-2019 tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Sembilan Agenda Program Prioritas Nasional yang disebut dengan **Nawacita**. Adapun kesembilan agenda prioritas nasional (**Nawacita**) tersebut yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD yaitu :

Tujuan : “ Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) “

Sasaran :

1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial
2. Terwujudnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegritasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program yang mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program kegiatan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2025 dijabarkan dalam 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Program Penanganan Bencana
- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan data dan informasi setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Penyiapan daftar isi dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
- b. Rancangan kerangka ekonomi daerah
- c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan

awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD. Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya .

Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Sosial telah menyiapkan rancangan rencana kerja di tahun 2025 seperti tabel berikut.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2025		
				Target	Rp	
		Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	4.48		KADINSOS
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.55		SEKDIN
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	95		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100	22,680,000	Sub Koord PEP
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	900,000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1,260,000	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	420,000	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1,260,000	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	210,000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	6,270,000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	12,360,000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	%	100	4,469,778,993	Sub. Koord. Keuangan
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	36	4,454,638,993	
1.06.01.2.02.05	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	8	10,060,000	
1.06.01.2.02.07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	9	5,080,000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	%	100	3,960,000	Sub Bag Umum & Kepegawaian
1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1,800,000	

1.06.01.2. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	2,160,000	
1.06.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	100	69.439.000	
1.06.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	42.009.000	
1.06.01.2. 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	108	2.430.000	
1.06.01.2. 05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	25,000,000	
1.06.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	295.258.423	
1.06.01.2. 06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	6,000,000	
1.06.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	20.682.500	
1.06.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	15.268.500	
1.06.01.2. 06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	72.459.900	
1.06.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	26.686.000	
1.06.01.2. 06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	5,000,000	
1.06.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	8.540.000	
1.06.01.2. 06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	132.021.523	
1.06.01.2. 06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	8,600,000	
1.06.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	538.550.000	
1.06.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	96.000.000	
1.06.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	22.550.000	
1.06.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	420.000.000	
1.06.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	405.299.000	
1.06.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	39.750.000	
1.06.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19	215.000.000	

1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	150.549.000	
		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	757.707.504	KADINSOS
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	%	85.57	757.707.504	KABID. DAYASOS
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	90	32.719.000	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	50	32.719.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	%	65.12	724.988.504	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	42	543.662.432	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	87.413.072	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	17	59.174.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	7	34.739.000	
		Capaian SPM Sosial	%	100		KADINSOS
		Persentase PPKS yang tertangani	%	86.83		KADINSOS
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti	%	100	453.387.392	
		Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	%	100	360.374.392	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	453.387.392	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	157.350.000	

	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	25.500.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	10,000,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	13,200,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	15,000,000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	2,500,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60	2,500,000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	9.324.392	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	25,000,000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	4,000,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	46,000,000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	%	100	93.013.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	70.513.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	7,500,000	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	10	15,000,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	562.040.000	

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	562.040.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	3,000	39.880.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	260	376.600.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	65.180.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	80.380.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	%	100	-	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	-	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	100.000.000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	62.310.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	135	51.550.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	135	22,825,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	15,000,000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	%	100	152,000,000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	12,000,000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	140,000,000	
TOTAL :					8,140,543,312	

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang dan berpedoman pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

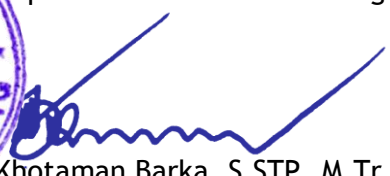
Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2025. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Pangkalpinang, Juli 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang




Khotaman Barka, S.STP.,M.Tr.IP

NIP. 198302102001121002